

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya.¹³ Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.

¹³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 3

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

B. *Good Governance*

1. Hakikat *Good Governance*

Konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep pemerintah (*government*) karena di dalam yang pertama, yaitu *governance*, terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (*government*) sendiri tetapi juga bersama-sama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat secara luas sebagai *stakeholders*. Hal ini disebabkan oleh karena adanya anggapan bahwa pemerintah sendiri dirasakan tidak memadai, mengingat kompleksitas kehidupan masyarakat yang menuntut adanya perubahan praktik pemerintahan dari yang semula didominasi oleh pemerintah menjadi sebuah tata pemerintahan yang membagi otoritas antara pemerintah dan masyarakat secara proporsional.¹⁴

Good Governance adalah tata pemerintah yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (struktur, fungsi,

¹⁴ Dwiyanto dkk, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2003), hal. 3 -4

manusia, aturan, dan lain-lain).¹⁵ *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk sebagian masyarakat Indonesia. Meski memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang *Good Governance*, sebagian besar masyarakat membayangkan bahwa dengan penerapan *Good Governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik.¹⁶ Salah satu permasalahan yang kerap kali menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yakni dalam bidang keuangan. Sekalipun dalam pemerintahan desa yang ruang lingkungannya tergolong kecil.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah harus merubah sistem birokrasi yang akuntabel.¹⁷ Untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak di sertai dengan transparansi maka keuangan tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya di dapatkan, namun pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum optimal. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

¹⁵ Indra Bastian, *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 4

¹⁶ Masnun, "Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Suatu Kajian di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi". *EKONOMIS*. Vol.2 No.1 Maret 2018, hal 175

¹⁷ Rai Devia dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali". ISSN: 2337-3067. Vol.7 No.4 2018, hal. 3

Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

Menurut pandangan syari'ah suatu pengertian *governance* termaktub dalam QS. Al-Hajj (18: 41) yang berbunyi:

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'nif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj 22: 41)¹⁸

Dengan menangkap *dalalah al-isyah ar-ramziyah* dari ayat ini kita dapat melihat bahwa *governance* dalam perspektif syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniannya sebagaimana disimbolkan oleh penegakan sholat, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh *tindakan amar ma'ruf nahi munkar*. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga aspek

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hal. 518

governance, yaitu *spiritual governance*, *economic governance*, dan *political governance*.

Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, ukhuwah dan amanah.

Birokrasi sebenarnya adalah sebuah pelayanan, bukan sebuah kekuasaan. Sebaliknya dalam paradigma kekuasaan, masyarakat sebagai konsumen layanan berkedudukan lemah dan tidak dapat menuntut hak-haknya sebagaimana mestinya. Akhirnya dari kondisi ini muncul praktik suap dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih buruk lagi praktik ini telah membudaya dalam arti bahwa tumbuh pemahaman umum pada pemberi pelayanan bahwa uang imbalan semacam itu adalah suatu yang wajar atas jasanya memberikan pelayanan dan masyarakat penerima layanan itupun juga merasa diuntungkan dan merasa wajar pula untuk mengeluarkan imbalan sebagai balas jasa, nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan.

Penegasan mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, misalnya dalam QS Al- Maidah (5: 8) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al- Maidah 44: 8).*¹⁹

Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi dan administratif. Pemimpin yang membiarkan perlakuan diskriminatif terhadap warganya dalam akses ini berarti tidak menjalankan prinsip pemerintahan yang baik.

Konsentrasi sumber daya ekonomi pada orang atau kelompok tertentu karena kolusi dan nepotisme adalah tanda dari kepemimpinan yang buruk untuk mengakses jabatan publik seperti ingin menjadi pegawai misalnya orang harus mengeluarkan sejumlah uang dan yang tidak mampu mengeluarkan uang tidak akan memperolehnya, meskipun ia memiliki keunggulan yang sangat potensial.

2. Pengertian *Good Governance*

Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. World bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,...hal. 159

administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²⁰

Definisi *Good Governance* menurut LAN dan BPKP²¹ yaitu: penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Tata kelola organisasi yang baik bisa dilihat dari konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal jauh lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomi. Mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Karakteristik *Good Governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

²⁰ Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Yogyakarta: ANDI OFFSE.2009), hal. 17

²¹ LAN, BPKP, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.2003)

3. Prinsip prinsip *Good Governance*

Menurut lembaga administrasi negara (LAN)²² terdapat prinsip-prinsip *Good Governance*, meliputi:

- a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan
- d. *Responsiveness*, lembaga lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder
- e. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effecitiviness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien dan efektif

²² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Sekretariat Negara RI, Jakarta.

- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.²³

Menurut Mardiasmo dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *Good Governance* yaitu *Value of money*.

1) Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- a. Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan.
- b. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah.
- c. Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.

²³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Sekretariat Negara RI, Jakarta.

Ada beberapa indikator dari transparansi, diantaranya:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya biaya dan tanggungjawab.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non-pemerintah.²⁴

2) Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Ada beberapa indikator dari partisipasi, diantaranya:

- a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka.
- b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

3) Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

²⁴ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik",...hal.19

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Ada beberapa indikator dari akuntabilitas, diantaranya:

- a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- b. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.
- c. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.²⁵

3) Ekonomi, efisiensi, efektivitas (*Value for money*)

Menurut Mardiasmo *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan

²⁵ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", ...hal.20-21

standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Ada beberapa indikator dari *value for money*, diantaranya:

- a. Meminimalkan input dan memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal).
- b. Rasio antara output dan input.
- c. Keberhasilan organisasi (tujuan tercapai dan program/kegiatan telah dilakukan dengan benar).²⁶

B. Standar Akuntansi Pemerintah

1. Hakikat Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara²⁷ dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat KSAP yang independen ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan.

Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan. Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan

²⁶ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik",...hal.21-25

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang "Standar Akuntansi Pemerintahan"

pertanggungjawaban professional KSAP. Penyusunan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi PSAP dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Sesuai dengan amanat undang-undang keuangan negara tersebut, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.²⁸ SAP tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Oleh karena itu, peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang "*Standar Akuntansi Pemerintahan*".

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menjadi akrual, peraturan pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan peraturan menteri keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

2. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3 tentang standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.²⁹

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3 Tentang “*Standar Akuntansi Pemerintah*”.

Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintah.³⁰ Dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintah dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor.

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian kementriannya maupun di pemerintah daerah dan dinas dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dipemerintahan dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Dengan ditetapkan SAP diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sehingga diperlukan langkah langkah strategi yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka

³⁰ Mahmudi, "Akuntansi Sektor Publik ", (Yogyakarta: UII Pres. 2009), hal.15

implementasi standar akuntansi pemerintahan.³¹

Menurut Nunuy³², Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 hal yaitu:

a. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pes dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

³¹ Irvan Permana, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas*, (Skripsi pada Universitas komputer Indonesia, Bandung. 2011. hal.2

³² Nunuy Nur Afiah, *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Prenada Media Gmp, 2009). hal. 27-28

c. Pengungkapan

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan yang disajikan (PP No.71 tahun 2010).

3. Prinsip- Prinsip dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (PP No.71 tahun 2010)³³ yaitu:

1) Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”

2) Nilai Historis (*Historical Cost*)

Pencatatan didasarkan pada nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi, dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi

formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas catatan atas laporan keuangan.

5) Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas laporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

6) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi intemai). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi pembaharuan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik disbanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

C. Laporan Keuangan Daerah

1. Keuangan Daerah

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

2. Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah.
- c. Masing masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
- d. Suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat/ daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.³⁴

D. Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

³⁴ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", ... hal.159

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dengan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu, artinya informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap, artinya informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan

dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi juga hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Penyajian Jujur, artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas, artinya Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.³⁵

E. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01 (PSAP 01)

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.³⁶

Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”

³⁶ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “Penyajian Laporan Keuangan”, (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2019), hal. 33

lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing masing.

1. Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna disini adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak anggota atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah 2 daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan 3 negara/daerah.³⁷

2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna

³⁷ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,...hal. 33

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 16 pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan

ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.³⁸

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal Asset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban dan Arus Kas. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Mengenai tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Anggaranary reports*) dan laporan finansial.³⁹

³⁸ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,...hal. 38-40

³⁹ *Ibid.*, hal. 40

Komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
- 5) Lain-lain
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.⁴⁰

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk menginformasikan mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

⁴⁰ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,...hal. 44-45

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) kas dan setara kas
- 2) investasi jangka pendek
- 3) piutang pajak dan bukan pajak
- 4) persediaan
- 5) investasi jangka panjang
- 6) aset tetap
- 7) kewajiban jangka pendek
- 8) kewajiban jangka panjang
- 9) ekuitas.⁴¹

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- 2) Beban dari kegiatan operasional
- 3) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 4) Pos luar biasa
- 5) Surplus/defisit-LO

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk

⁴¹ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,hal. 45-46

menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.⁴²

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam

⁴² Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,hal. 52-54

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 22 Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.⁴³

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.⁴⁴

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

⁴³ *Ibid.*, hal. 52

⁴⁴ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,hal. 54

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan.⁴⁵

4. Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan jika perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan.
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan.
- d. Mata uang pelaporan.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 54-55

- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.⁴⁶

5. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.⁴⁷

6. Tanggal Efektif

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan

⁴⁶ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,hal. 42-43

⁴⁷ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”,hal. 43

PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju AkruaI paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.⁴⁸

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang dijadikan tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini, penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian bagi dari segi teori maupu konseptual. Berikut ini penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

Penelitian Purwita yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Kuningan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan dengan laporan keuangan dan menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif artinya semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah terletak pada pengujian pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dan metode yang digunakan. Perbedaan terletak pada penambahan variabel bebasnya yaitu penerapan *Good Governance* jika pada penelitian ini hanya menguji

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 57

pengaruh penerapan Standar Akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan, pada penelitian yang akan dilakukan peneliti ditambah variabel penerapan *Good Governance*, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian.⁴⁹

Penelitian Azlim dkk yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Metode Yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan instrument penelitian berupa angket/kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah variabel bebas yang digunakan yaitu *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah serta metode dan instrument penelitian yang digunakan. Perbedaan terletak pada Lokasi penelitian dan acuan yang digunakan, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan acuan PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah.⁵⁰

Penelitian Inapty dan Martiningsih yang bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel *moderating*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan eksploratori dengan jenis

⁴⁹ Erma Purwita, “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Kuningan)*”. Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2013.

⁵⁰ Azlim, Darwanis dan Usman Abu Bakar, “*Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*”, Jurnal Akuntansi Volume 1. Nomor 1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2012.

penelitian *survey research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal berpengaruh tidak signifikan Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel *moderating*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah salah satu variabel pengujian yang digunakan yaitu penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan. Perbedaan terletak pada variabel bebas yang digunakan, metode dan lokasi penelitian.⁵¹

Penelitian Maramis dkk yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan instrument penelitian berupa angket/ kuesioner, analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado, akan tetapi penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Persamaan terletak pada salah satu variabel yang digunakan yaitu *Good Governance*, metode, instrumen dan teknik analisis data yang digunakan. Perbedaan terletak pada

⁵¹ Inapty dan Martiningsih, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan", *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 9. Nomor. 1 April 2016

variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah.⁵²

Penelitian Rinaldi yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan instrument angket/ kuesioner, teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada 2 variabel prediktor yang digunakan yaitu *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan, metode, instrument dan teknik analisis data yang digunakan. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan variabel terikatnya.⁵³

Penelitian Zeyn yang bertujuan untuk menganalisis penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang terdiri dari *descriptive*

⁵² Maramis, Morasa dan Wokas, “Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Volume.3 Nomor. 1 Universitas Sam Ratulangi, 2018.

⁵³ Rizky Rizal Rinaldi, “Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah”, Jurnal Ilmiah Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016.

survey dan *explanatory survey* dengan *investigation survey* yang bersifat kausalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *penerapan Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan. Persamaan terletak pada variabel predictor yang digunakan yaitu *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan variabel terikatnya.⁵⁴

Penelitian Juwita yang bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota/Kabupaten Jawa Barat, secara parsial dan simultan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory survey*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota/Kabupaten Jawa Barat, Implementasi Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh positif signifikan Kualitas Laporan Keuangan di Kota/Kabupaten Jawa Barat dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota/Kabupaten Jawa Barat. Persamaan terletak pada salah satu variabelnya yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan pada metode penelitian dan lokasi penelitian.⁵⁵

⁵⁴ Elvira Zeyn, "Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan", Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, Volume 1. Nomor 1. Hal 21-37, Universitas Pasundan Bandung, 2011

⁵⁵ Rukmi Juwita, "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan", Jurnal Trikonomika, Volume.12 Nomor. 2 Desember 2013

Penelitian Oktarina dkk, yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang, Study kasus pada BPKAD Kota Semarang tahun 2014. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan bantuan program SPSS Versi 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang. Persamaan terletak pada variabel prediktor yang digunakan yaitu *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencakup ruang lingkup yang lebih sempit yaitu fokus pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa saja.⁵⁶

Penelitian Sari dan Fadli yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metod kuantitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

⁵⁶ Mia Oktarina, Kharis Raharjo dan Rita Andini, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang”, *Journal Of Accounting*, Volume. 2 Nomor. 2 Maret 2016.

Daerah. Persamaan terletak pada variabel prediktornya yaitu *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan terletak pada metode dan lokasi penelitian.⁵⁷

Penelitian Kusumah yang bertujuan untuk mengetahui 1 Penerapan Standar Akuntansi pemerintah pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2 Kualitas Laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya. 3 Pengaruh penerapan Standar Akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan Standar Akuntansi pemerintah pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya baik, Kualitas Laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya baik serta terdapat pengaruh signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya. Persamaan terletak pada variabel prediktor yang digunakan yaitu Standar Akuntansi pemerintah. Perbedaannya jika pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel prediktor atas kualitas laporan keuangan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan dua variabel prediktor yaitu *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan, lokasi penelitian juga berbeda.⁵⁸

⁵⁷ Gusrya Indria Sari dan Fadli, “Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

⁵⁸ Arif Adi Kusumah, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya”. Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi.

G. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Faktor faktor yang mempengaruhi kurangnya tata kelola yang baik diantaranya menyangkut transparansi dan akuntabilitas, maka kualitas laporan keuangannya pun rendah. Dampak dari kurangnya pengelolaan yang baik maka terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat empat prinsip yang mendukung pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi dan *value for money*.⁵⁹

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh yang membutuhkan. Akuntabilitas dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Kinerja tidak hanya dinilai dari sisi output yang dihasilkannya saja, tetapi juga mempertimbangkan input, output dan outcome juga.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sangatlah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena *good governance* merupakan penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi

⁵⁹ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik",...hal.19

baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Hubungan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan termuat jelas pada pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan bahwa “Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata”

3. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara didunia termasuk Indonesia. Untuk

menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

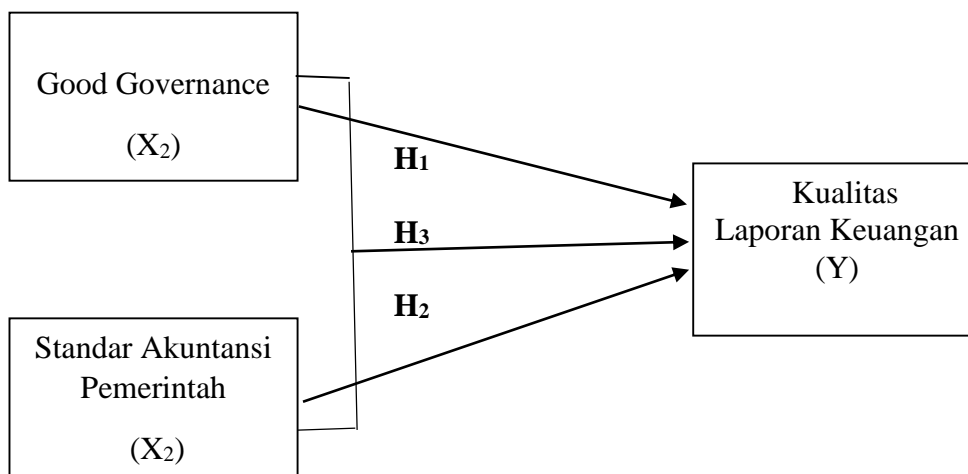
Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa “standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

⁶⁰Dengan demikian berdasarkan teori tersebut terdapat hubungan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan meliputi empat karakteristik berikut ini yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki diantaranya relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik maka harus dibenahi dari tata kelola pemerintah yang baik, serta harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3 Tentang “*Standar Akuntansi Pemerintah*”

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Sumber: Gambar oleh Peneliti, 2020

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang dijelaskan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Secara parsial:

H₁ Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

H₂ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

2. Secara simultan:

H₃ Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.